

**PERTAMBANGAN TANPA IZIN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Nama: Yustinus Jeffri Setiawan Roni

Jurusan/Program Studi: Hukum

Pembimbing: 1. Dr.Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Izin wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan setiap tahapan kegiatan pertambangan. Perbuatan M yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, segala perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah sebuah tindak pidana. Terhadap lingkungan di sekitar aliran sungai lekso akibat dari perbuatan M yang melakukan pertambangan tanpa izin sebaiknya M melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Ayat (1) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: Pertambangan Tanpa Izin, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

**ILLEGAL MINING WHICH CAUSED ENVIRONMENTAL DAMAGE
VIEWED FROM THE LAW NUMBER 32 OF 2009 ON THE
PROTECTION AND MANAGEMENENT OF ENVIRONMENT**

Name: Yustinus Jeffri Setiawan Roni

Departement/Study Program: Law

Advisors: 1. Dr.Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
 2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRACT

Mining is part or the entire stages of activities of researching, managing, and exploiting minerals or coal which consist of general research, exploration, feasibility study, construction, mining, processing purifying, transporting and selling, and also the post mining activities. A permits is required for anyone who conducts every stage of the mining activities. M action of conducting an illegal mining could cause the destruction of the surrounding environment, and it violated the Law Number 32 of 2009 on The Protection and Management of Environment wich stated that any action causing pollution and/or damage to the environment is a criminal act. M should perform restoration of the environmental functions around the Lekso river as a result of his actions in accordance with Article 54 Paragraph (1) of Law Number 32 of 2009 on The Protection and Management of Environment.

Keywords: *Illegal Mining, Environmental Damage, Restoration of Environmental Functions, Law on Minerals and Coal Mining*